

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, saya mengambil beberapa artikel ilmiah sesuai topik yang peneliti ambil. Peneliti melakukan pencarian dengan tujuan menemukan sesuatu dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan sebagai data pendukung yang akurat untuk penelitian yang dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul **“Kebijakan Presiden Trump Dalam Mengurangi Dana Bantuan the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East (UNRWA) 2018”** karya Mutia Salsabila Widiyanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Didalam jurnal tersebut, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah: 1) Kepemimpinan Presiden Trump yang mengandung kontroversi seperti pengakuan Yerusalem oleh AS menjadi Ibu Kota Israel; 2) Penghentian dana bantuan melalui UNRWA yang dilakukan sejak tahun 1950 pada kepemimpinan Trump lebih dari US\$200 juta bantuan dengan beralasan Palestina tidak memberikan apresiasi terhadap AS karena tidak mau bernegosiasi dengan Israel.

Persamaan: dalam penelitian karya Mutia Salsabila Widiyanti dan penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Luar Negeri yang dilakukan pemerintahan AS. Perbedaan: dalam penelitian karya Mutia Salsabila lebih menekankan analisisnya pada pemerintahan era Trump, dan penelitian karya Mutia Salsabila Widiyanti menekankan analisisnya pada respon-respon organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan pada penelitian Mutia Salsabila hanya berfokus pada masalah penghentian dana yang dilakukan AS pada era Trump.

2. Jurnal yang berjudul **“Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Joseph Biden”** karya Ziyad Falahi dan Poltak Partogi Nainggolan, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021. Didalam jurnal tersebut penulis dapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah: 1) Eksistensi AS dibawah kepemimpinan presiden era baru Joe Biden sebagai negara adidaya dilihat melalui upaya negosiasi dan berdiplomasi di meja perundingan; 2) AS yang tidak mau kehilangan peran internasionalnya menghadapi musuhnya seperti Rusia dan China dan terus mengembangkan hegemoninya demi kepentingan nasional. Persamaan: dalam penelitian karya Ziyad Falahi dan Poltak Partogi Nainggolan membahas kebijakan pemerintah Biden melakukan kepentingan multilateral yang berbeda dengan pendahulunya, dan membahas

kebijakan luar negeri di Timur Tengah khususnya konflik Israel-Palestina di era Trump memutuskan dana untuk Palestina. Perbedaan: dalam penelitian Ziyad Falahi dan Poltak Partogi Nainggolan menekankan kebijakan luar negeri pada analisisnya secara global, di Timur Tengah konflik Israel-Palestina, di Eropa menyatakan kembali komitmen AS pada Kesepakatan Iklim Paris, dan di wilayah Indo-Pasifik mengadakan pertemuan oleh India, Australia, Jepang, sebagai sekutu pada masa pandemi dalam QUAD untuk menghambat Cina dengan kebijakan OBOR.

3. Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Trump Peace Plan Terhadap Proses Perdamaian Israel dan Palestina Periode 2017-2020”**

karya Zulfah Khoirunnisa Irbah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Didalam skripsi tersebut penulis dapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: (1) Kebijakan Trump *Peace Plan* merupakan kebijakan AS untuk perdamaian konflik Israel-Palestina yang dirancang sengaja agar di tolak oleh Palestina untuk memenuhi agenda dan kepentingan yang dimiliki; (2) Perilisan Trump *Peace Plan* merupakan bentuk kebijakan luar negeri untuk menopang posisi Trump sebagai Presiden AS dan seorang PM Israel yang didakwa atas kasus korupsi. Persamaan:

dalam penelitian Zulfah Khoirunnisa Irbah membahas kebijakan luar negeri pada pemerintahan Trump seperti pertemuan antara Trump dengan Israel maupun Palestina, dan memakai Teori Kebijakan Luar Negeri. Perbedaan: dalam penelitian Zulfah Khoirunnisa Irbah lebih menekankan implikasi Trump *Peace Plan* terhadap perdamaian Israel dan Palestina, dan pada penelitian Zulfah Khoirunnisa Irbah menggunakan Konsep Idiosinkratik dan konsep *Peace*.

2.2 Kerangka Teori

Didalam penelitian ini, terdapat teori dan konsep yang penulis gunakan dalam menganalisa permasalahan yang akan dikaji, diantaranya sebagai berikut:

2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam konteks ini, Kebijakan luar negeri harus dilihat sebagai momen penting dalam proses aksi, reaksi dan tindak lanjut aksi yang melibatkan berbagai pihak aktor-aktor yang berbeda. Interaksi sistem global itu sendiri biasanya dilakukan dengan kehadiran suatu negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri sebagai bukti positif dan eksistensi suatu negara di mata dunia internasional. Kebijakan luar negeri sering diartikan sebagai jembatan untuk

berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain maupun aktor lainnya dengan cara diplomasi.⁴

Richard Snyder, seorang pakar politik asal Amerika Serikat yang mengkhususkan kajiannya dalam bidang kaji kebijakan luar negeri, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintahan suatu bangsa dalam mencapai kepentingannya dengan hubungannya dengan entitas lain.⁵ Rosenau menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara yang menghadapi situasi yang kompleks meliputi kaitan eksternal dan internal.⁶ Berarti kedua kaitan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai.

Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi, berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berkaitan dengan peristiwa dan kondisi situasi lingkungan eksternal.⁷ Jadi, Kebijakan luar negeri suatu bentuk perilaku yang setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi diluar pada situasi tertentu.

⁴ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). hal. 40.

⁵Richard C. Snyder & H. W. Bruck, Burton Sapin. Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. (Princeton: Princeton University Press, 1954). hal. 7.

⁶Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Loc. Cit.* hal.49

⁷Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Loc. Cit.* hal. 55.

Dalam penelitian ini, penelitian ini akan berfokus pada faktor tujuan dan tindakan aktor lain dan faktor masalah regional atau global. Penelitian ini melihat konflik Israel-Palestina sebagai masalah yang terletak di Timur Tengah dan sangat berdampak pada kawasan sehingga upaya damainya telah menjadi perhatian secara global. Dalam rangka mengupayakan perdamaian, AS mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Penelitian ini dilihat dari kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang dipengaruhi oleh tujuan dan tindakan Israel, dalam hal ini politik dalam negeri Israel. Penelitian ini juga melihat birokrasi sebagai faktor dalam proses pengambilan keputusan. Birokrasi yang dimaksud adalah bagaimana proses yang dilakukan negara untuk dapat mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri. Penelitian ini dilihat dari negara-negara yang ikut serta untuk perdamaian Timur Tengah sebagai faktor penting dalam proses kebijakan luar negeri AS.

2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki. Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional,

bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Konsep kepentingan nasional dalam menganalisis hubungan antar negara adalah sebuah konsep yang sangat lazim dan juga populer digunakan. Konsep ini digunakan sebagai barometer keberhasilan suatu politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu Negara, seperti apa yang dikemukakan oleh Morgenthau (1990) bahwa:

“Kepentingan yang sebenarnya dari suatu bangsa merupakan kenyataan obyektif yang bisa digambarkan dan bahwa dengan membuat outline tentang kenyataan itu, analisis-analisis bisa menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai pengukur sesuai atau tidaknya, benar atau tidaknya berbagai politik luar negeri yang dijalankan.”

Menurut Hans J. Morgenthau didalam *“The Concept of Interest defined in Terms of power”*, konsep kepentingan nasional (national interest) yang didefinisikan dalam istilah “power” menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal, atau “reason” yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan

fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.⁸

Kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam segala kebijakan yang dilakukan oleh sebuah Negara terhadap Negara lain dan merupakan tujuan umum yang akan terus berkesinambungan agar suatu Negara dapat bertindak. Oleh karenanya dapat disebutkan bahwa kepentingan nasional itu merupakan aspirasi sebuah Negara dan dari kepentingan tersebut dapat diambil langkah-langkah kebijaksanaan terhadap lingkungan tempat berinteraksinya.

2.2.3 Konsep Bantuan Luar Negeri

Secara umum beberapa tindakan yang dilakukan dalam menanggapi suatu fenomena terkadang memiliki bentuk dan caranya masing-masing salah satunya berupa bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara.⁹ Bantuan luar negeri dari suatu negara dapat pengiriman uang, barang, atau bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima bantuan.¹⁰ Micheal Todaro, memberikan pendapatnya bahwa Bantuan Luar Negeri bahwa:

“Segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara-negara tertentu terhadap negara lainnya yang

⁸ Aleksius Jemadu. Politik global dalam teori dan praktik. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). hal.67.

⁹ Sara Lengauer. Tiongkok's Foreign Aid Policy: Motive and method. (The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol 9, Issue 2, 2011). hal. 35.

¹⁰ K.J. Holsti, terj. Wawan Juanda, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, (Cetakan Kedua Bandung: Binacipta, 1987), hal 321.

memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian dan penanaman modal asing”¹¹

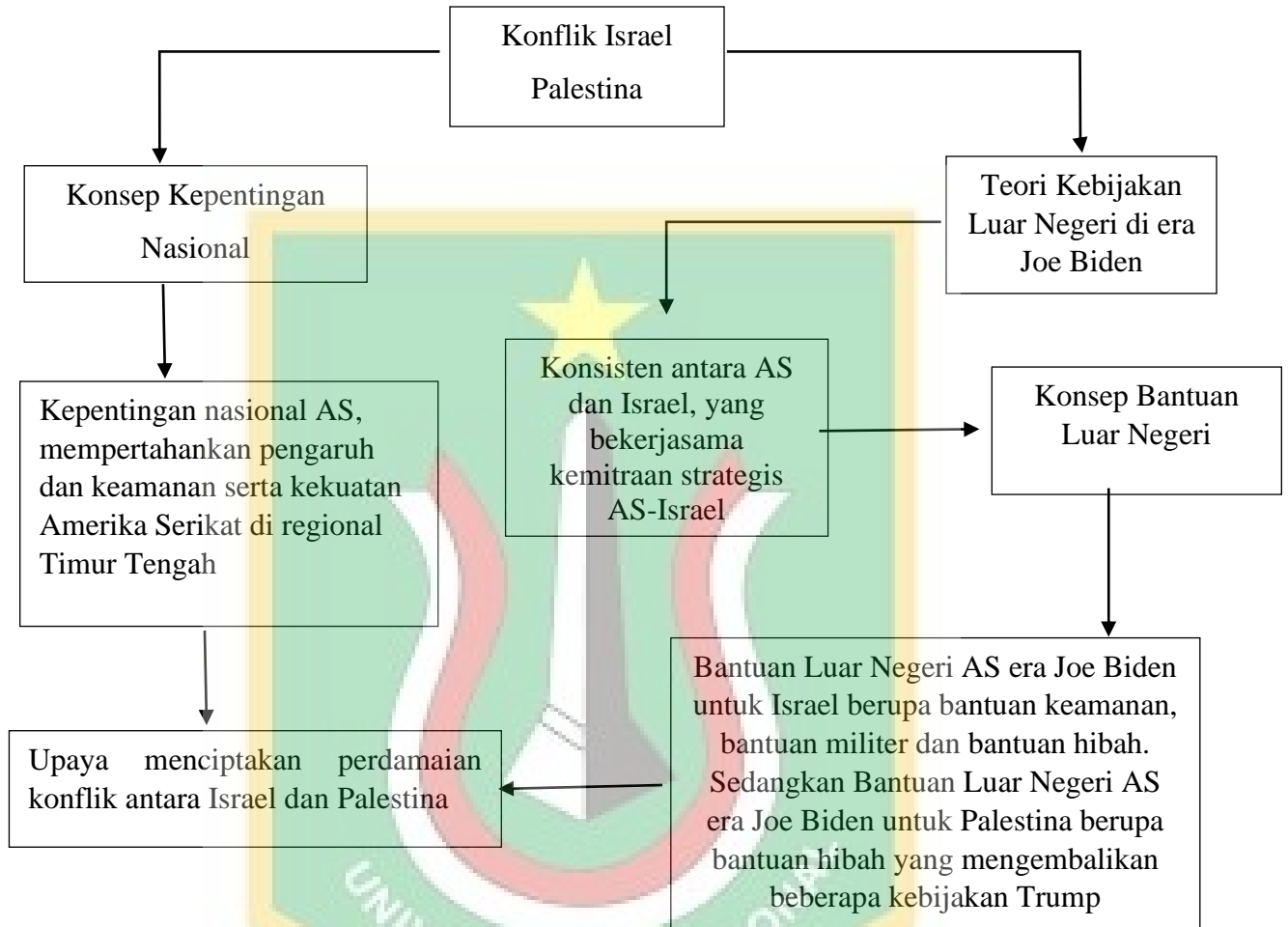
K.J Holsti dalam bukunya *International Politics: Framework of Analysis, A Political Theory of Foreign Aid* membagi motif bantuan luar negeri yang merupakan dorongan bagi negara donor untuk memberikan bantuan luar negerinya kepada negara penerima yang sekaligus merefleksikan tujuan dari negara donor dalam memberikan bantuan tersebut kepada negara penerima.¹² Morghentau dalam artikelnya yang berjudul *A Political Theory of Foreign Aid* mencoba untuk mengembangkan tipologi dari bantuan internasional. Morghentau mengidentifikasi enam jenis kebijakan bantuan luar negeri. Motif-motif tersebut antara lain: militer, bantuan kemanusiaan, subsistence, bantuan pada hal-hal mendasar suatu negara (fundamental), kebanggaan, dan bantuan untuk pembangunan ekonomi.

Bantuan luar negeri diartikan sebagai bantuan yang mengekspresikan belas kasih kepada korban konflik dan pemberian bantuan terhadap kemiskinan dengan tujuan membantu masyarakat miskin di negara berkembang sebagai landasan utamanya, sehingga motif ini menekankan pada nilai moral negara pendonor untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga.

¹¹ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007) hal. 188.

¹² K.J Holsti. *International Politics: Framework of Analysis* (New Jersey: Patience Hall, 1995), hal 180.

2.3 Kerangka Pemikiran



Konflik Israel dan Palestina yang tak kunjung selesai, membuat Joe Biden agak berbeda kebijakan luar negerinya dari pendahulunya, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, masih tetap konsisten antara AS dan Israel tetapi Joe Biden memberikan bantuan luar negeri untuk Palestina melalui UNRWA yang pada masa Donald Trump di hentikan bantuan dana tersebut. Organisasi Internasional yaitu PBB juga berperan untuk menciptakan perdamaian.